

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

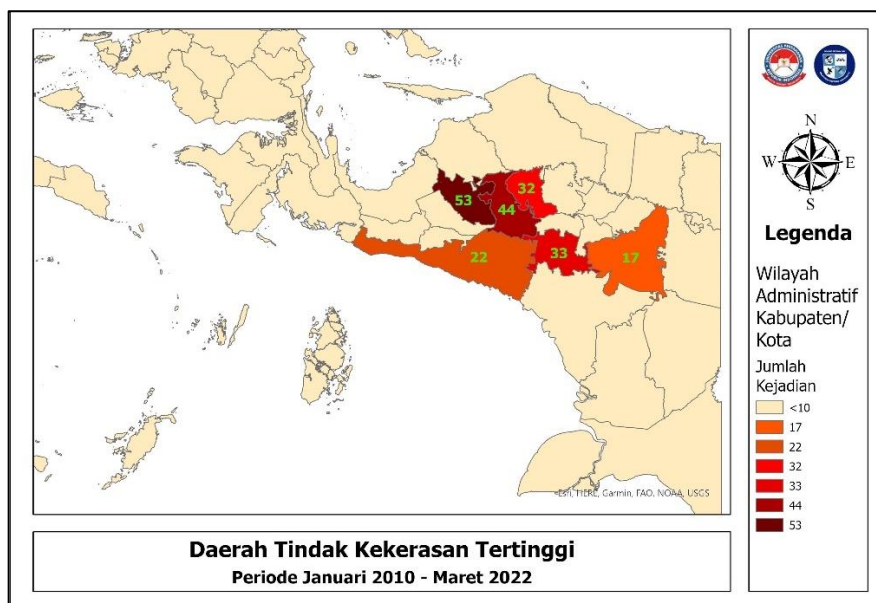
Kondisi dan Situasi kehidupan bermasyarakat di wilayah Papua sampai saat ini dapat dibilang dalam kondisi yang belum kondusif. Hal ini dipicu oleh konflik yang berkepanjangan sejak lama antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang ingin wilayah Papua keluar dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada 29 April 2021, telah menyatakan bahwa kelompok ini merupakan kelompok Teroris berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 karena telah melakukan tindakan menggunakan kekerasan serta ancaman yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut yang meluas, serta memungkinkan korban atau kehancuran pada objek vital nasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

Tingginya dinamika permasalahan keamanan di Papua dapat dikatakan masih menggambarkan kondisi yang belum menunjukkan adanya perhatian dan usaha penyelesaian yang baik dari pemerintah pusat. Kondisi ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah kasus penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua kepada aparat keamanan dan masyarakat sipil. Pada bulan Maret 2022, Tim dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada mempublikasikan laporan terkait tindak kekerasan yang telah terjadi di wilayah Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Maret 2022. Dalam kurun waktu 12 tahun ini, setidaknya terdapat 2.118 korban yang terdiri dari 1.654 korban luka dan 464 korban jiwa (Gambar 1.1). Korban ini didominasi oleh masyarakat sipil dan aparat keamanan TNI dan Polri yang sedang bertugas.

Terdapat 6 daerah dengan tingkat kejadian penyerangan tertinggi yaitu (Gambar 1.2) ; Kabupaten Yahukimo (17 Kejadian), Kabupaten Mimika (22 Kejadian), Kabupaten Puncak Jaya (32 Kejadian), Kabupaten Nduga (33 Kejadian), Kabupaten Puncak (44 Kejadian), dan Kabupaten Intan Jaya (53 Kejadian). Kejadian penyerangan mulai mengincar pada objek-objek sarana umum masyarakat seperti bangunan sekolah dan puskesmas, hingga proyek pembangunan jalan Trans Papua. Pada Mei 2022 yang lalu, penyerangan terhadap warga sipil dalam bentuk pembakaran dan perusakan kawasan perumahan guru SMA Negeri 1 Illaga dan pembakaran Aset milik PT. MTT. Sehingga diperlukan jaringan pengamanan seperti pembangunan pos pengamanan di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.



**Gambar 1.1. Korban penyerangan KSTP Periode Januari 2010 - Maret 2022 (Sumber: GTP UGM)**



**Gambar 1.2. Daerah dengan jumlah kejadian penyerangan tertinggi di Papua (Sumber: GTP UGM)**

Berbagai tindakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dari kejadian tersebut belum menemui akhir penyelesaian. Konflik berkepanjangan telah menghambat pembangunan Papua, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, kesehatan dan penyediaan layanan dasar dan infrastruktur untuk mobilitas sosial masyarakat Papua. Program pembangunan provinsi Papua telah dilakukan, Namun pendekatan pembangunan dari perspektif pembangunan dan pengelolaan manusia sangat berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pendekatan dengan cara menggabungkan 4 aspek yaitu (1) Pendekatan Keamanan; (2) Pendekatan Pembangunan (3) Pendekatan keadilan budaya dan (4) Penanganan kasus HAM. 4 Keempat pendekatan ini menjadi salah satu upaya penyelesaian masalah konflik Papua dan membuka Papua sebagai pintu gerbang timur Indonesia.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2020 akhirnya memutuskan kebijakan strategis guna menyelesaikan permasalahan ini dengan menerbitkan kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah antara lain; Inpres No. 9 Tahun 2020, Keppres No. 20 Tahun 2020, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 yang membahas pembangunan kesejahteraan dan keamanan di Papua yang bersifat terintegrasi, komprehensif, berkelanjutan, dan terpadu. Di dalam kebijakan tersebut, peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan sarana dan pra-sarana merupakan langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Tentara Nasional Indonesia juga ditugaskan untuk menjaga keamanan dan mengatasi ancaman yang terjadi dengan melakukan pembangunan Komando Teritorial dan mampu melakukan investigasi ancaman yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan keamanan masyarakat. Hal ini mengingat meningkatnya kejadian penyerangan terhadap masyarakat sipil dan juga personel keamanan di Papua, sehingga

operasi militer selain perang dalam bentuk operasi teritorial perlu ditingkatkan agar memberikan rasa aman bagi masyarakat dan juga menjaga proses pengembangan yang sedang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Papua.

Pelaksanaan dari operasi teritorial di wilayah ini akan sangat membantu pelaksanaan pengamanan di wilayah rawan di Papua. Menurut Mulyadi (2009) penyelenggaraan operasi teritorial sangatlah penting untuk menyiapkan kemampuan perlawanan rakyat yang didasari oleh ruang, alat, dan kondisi juang yang memadai bagi seluruh elemen masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap kelompok separatis yang mengancam kedaulatan negara. Hal ini mengingat objek serangan yang dilakukan oleh kelompok separatis didominasi oleh masyarakat sipil dan aparat keamanan (Gugus Tugas Papua UGM, 2022).

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi saat ini memberikan bantuan dalam pelaksanaan penyelidikan hingga penyusunan rancangan kegiatan operasional terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan (Coskun et al, 2008). Dalam penanganan aktivitas terorisme, khususnya dalam melakukan identifikasi pola secara spasial dan temporal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan teroris dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi geografis (Brent et al, 2008). Selain itu, salah satu strategi pertahanan dengan memanfaatkan *Geospatial Intelligence* atau Geolnt yang merupakan pemanfaatan teknologi dalam eksploitasi dan pengolahan data citra dan informasi geospasial.

Geolnt dapat dimanfaatkan dalam pengumpulan hingga analisis data, yang secara langsung sangat bergantung kepada teknologi survei dan pemetaan yang dalamnya terdapat Sistem Informasi Geografis dan teknik penginderaan jauh dalam analisis dan penyajian informasi. Sehingga dengan demikian, penggunaan analisis spasial dan temporal berdasarkan informasi yang ada dapat membantu pelaksanaan operasi teritorial di wilayah-wilayah seperti di Papua dalam melawan kelompok separatis teroris.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan pada subbab sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah yang nantinya akan dijadikan bahan dalam penelitian tesis ini, masalah-masalah tersebut antara lain;

- a. Kondisi Geografis Papua yang cukup kompleks
- b. Adanya konflik bersenjata antara pihak keamanan dengan kelompok separatis teroris
- c. Akan dilakukannya pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat terpusat, terpadu, dan komprehensif di wilayah Papua
- d. Perlu mempersiapkan Komando Teritorial yang tepat dan terpadu
- e. Perlu dilakukannya analisis yang bersifat spasial guna mendukung kegiatan pembangunan sarana dan pra-sarana penunjang kesejahteraan masyarakat
- f. Penerapan *Geospatial Intellegence* untuk menjaga keamanan

## 1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, akan menggunakan beberapa pembatasan masalah yang bertujuan agar pembahasan yang ada di dalam penelitian ini nantinya tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Batasan-batasan tersebut antara lain;

- a. Penelitian ini akan menggunakan data yang bersifat *open access* atau dapat diakses oleh publik
- b. Pada penelitian ini, objek yang akan diolah adalah data informasi geospasial sebagai sarana pendukung dalam menangani permasalahan keamanan di Kabupaten Puncak.
- c. Lokasi penelitian akan difokuskan pada daerah Kabupaten Puncak dan sekitarnya.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan beserta turunannya, mulai dari level strategis hingga taktis bertujuan untuk menjawab ancaman dari gerakan separatisme sebagai salah satu tantangan bagi pertahanan dan keamanan nasional telah dipersiapkan dengan baik. Sebagai turunan dari peraturan-peraturan ini, pelaksanaan kegiatan operasional dan taktis di lapangan telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia dan pendukung lainnya yang berkemampuan khusus dan dalam jumlah besar yang kemudian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan keamanan di Papua. Namun, pada kondisi di lapangan hingga saat ini ancaman keamanan yang ditujukan kepada masyarakat dan aparat keamanan masih tinggi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah penelitian yang cukup kompleks dan kebutuhan akan pembangunan pos pengamanan yang optimal di daerah tersebut.

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan saat ini, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah penempatan pos pengamanan yang optimal berdasarkan analisis kondisi geografis wilayah, informasi spasial lainnya, dan historis kejadian penyerangan oleh kelompok separatis. Sehingga, dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian ini, maka rumusan pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Bagaimana pengaruh tutupan lahan dan faktor spasial lainnya dalam pembangunan pos pengamanan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah?
- b. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Geografis dan *Geospatial Intelligence* dalam penentuan lokasi pos pengamanan di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah?

- c. Bagaimana pembuatan model informasi spasial dalam penentuan pos pengamanan dalam mendukung operasi teritorial di Kabupaten Puncak?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain;

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis tutupan lahan dan aspek spasial dalam penentuan pos pengamanan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
- b. Mengembangkan penggunaan Sistem Informasi Geografis dan *Geospatial Intellegence* dalam penentuan lokasi pos pengamanan dalam mendukung operasi teritorial di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
- c. Menghasilkan model informasi spasial dalam penentuan pos pengamanan dalam mendukung operasi teritorial di Kabupaten Puncak.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil dari kegiatan penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemangku kebijakan dan unit pelaksana di lapangan. Manfaat itu terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

#### **1.6.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian akan memberikan kontribusi dalam hal;

- a. Pengembangan konsep dan teori dalam analisis tutupan lahan dan faktor spasial lainnya dalam mendukung pertahanan dan keamanan khususnya penentuan pos pengamanan ideal di daerah dengan kondisi geografis yang kompleks.
- b. Pengembangan konsep Sistem Informasi Geografis dan *Geospatial Intellegence* dalam mendukung pertahanan dan

keamanan negara, khususnya dalam menghadapi ancaman dari gerakan separatis.

- c. Pengembangan teori dan konsep pembuatan model informasi spasial dalam mendukung pertahanan dan keamanan negara, khususnya dalam menghadapi ancaman dari gerakan separatis.

### **1.6.2. Manfaat Praktis**

Manfaat secara praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam penanganan aksi separatisme di daerah Papua yang antara lain;

- a. Memberikan masukan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), serta pelaksana di lapangan yaitu Komando Teritorial dari tingkat Komando Daerah Militer hingga Ranting Militer dalam penanganan aksi separatisme di daerah Papua yang memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks
- b. Memberikan konsep dalam pemanfaatan *Geospatial Intelligence* dalam penanganan aksi separatisme di wilayah Papua kepada aparat pengamanan di level strategis hingga taktis.
- c. Memberikan model konseptual informasi spasial dalam menentukan pos pengamanan dalam rangka penanganan aksi separatisme di wilayah Papua kepada aparat pengamanan di level strategis hingga taktis.